

Universitas Sumatera Utara – Medan

Kesiapan Daerah Menyongsong Desentralisasi
(Regional Preparations to Welcome Decentralization)

Decentralization Workshop II
Strengthening the University Capacity to Support Decentralization
(Lokakarya Kedua Untuk Meninggikan Kesanggupan Universitas
Mendukung Desentralisasi)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 4 – 10, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

KESIAPAN DAERAH MENYONGSONG DESENTRALISASI

(Hemat R. Brahmana *dan* Harmein Nasution)



Dalam Rangka Melaksanakan
DECENTRALIZATION WORKSHOP SCHEDULE
Second LPEM FEUI - IRIS
(June 4th - 10th, 2000)

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 0 0

PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA [LONSUM] Tbk.

Tersebar di Sumatera Utara (60%), Sumatera selatan, Jawa, Sulawesi, Kalimantan.

Khusus Sumut : 41. 507,2 Ha.

Tersebar di : Kabupaten Langkat, Deli serdang, Asahan, Simalungun dan Lab. Batu
Produk yang dihasilkan :

1. Sheet dan Crumb Rubber (Deli serdang & Labuhan Batu).
2. CPO dan Inti sawit (Langkat, Deli Serdang, Asahan).
3. Biji Kakao Kering (Deli serdang dan Simalungun).

Hasil Ekspor per tahun 1999.

Karet : Rp. 71.832.087.783

CPO : Rp. 171.435.311.792

Biji Kakao Kering : Rp. 24.468.980.580.

Hasil dari pasar lokal :

CPO : Rp. 105.898.096.429

Inti Sawit : Rp. 57.469.620.920.

[dikutip dari data PT Lonsum sendiri].

Bibit Sawit bersertifikat berasal dari Sumut :

-Rispa, Socfindo dan Lonsum.

NV. STTC Pematang Siantar penghasil Rokok putih.

Cukai : 48,4 miliyar rupiah.

PPN : 16,5 miliyar rupiah

PPH : 8,5 miliyar rupiah.

Merek Rokok yang diproduksi : Union [plain, filter,king], Hero [filter,king], United Filter King, Union Special Filter King, Kennedy Filter King, West Filter King, West 100'S, Jet Filter King, Marcopolo King size, Union International dan Hero International.

Merek Jet Filter dan Hero menjadi rokok favorit di Vietnam dan Kamboja yang dieksport melalui Laos, karena perusahaan rokok Vinataba Vietnam mendapatkan proteksi dari negara.

Sumber bahan baku Tembakau jenis Virginia dari daerah Propinsi Sumatera Utara berasal dari daerah kabupaten : Karo [140 ha], Tapanuli Utara [56 ha], Simalungun [52 ha], Tapanuli selatan [50 ha], dairi [14 ha] dan Deli Serdang [7 ha] yang melibatkan 1405 orang Petani.

[Data bersumber dari Perusahaan STTC].

DAERAH KABUPATEN/ KOTA	HORTIKULTURA	PERKEBUNAN	HASIL HUTAN	PERIKANAN	TERNAK
1.MEDAN					Walet
2. DELI SERDANG					Unggas,Babi.
3.LANGKAT	Jeruk,Rambutan	CPO,Kakao,Kart	Plywood	Tambak,Laut	Unggas ,Babi
4.ASAHAN		CPO,Kakao,Kart		Tambak,Laut	
5. LABUHAN BATU		CPO,Kakao,Kart		Tambak,Laut	Walet
6. SIMALUNGUN	Jeruk,Sayuan,	CPO,Kakao,Kart			Babi
7. KARO		Teh, Kopi			
8. BINJAI	Jeruk,Sayur,Bunga	Kopi, Vanili			Unggas
9. TEBING TINGGI	Rambutan				Unggas
10. TANJUNG BALAI				Laut	Walet
11. PEMATANG SIANTAR			Wood Working		
12. DAIRI			Minyak nilam		
13. TOBA SAMOSIR		KOPI	Pulp		
14.TAPANULI UTARA	Sayur				
15.MANDAILING NATAL		CPO, Karet	Kayu olahan	Laut	Walet
16.TAPANULI SELATAN		Karet			Sapi
17.TAPANULI TENGAH		Karet			
18. SIBOLGA			Kayu olahan	Laut	
19. NIAS		Kelapa			

DAERAH KABUPATEN/ KOTA	AGRO INDUSTRI	MANUFAKTUR	LOGAM	ANEKA INDTR	PARIWISATA
1.MEDAN	Edible/Oleo Kimia	Elektronik,Polimer	Besi	Berbagai btk	Tangkar buaya
2. DELI SERDANG	Edible,Kaleng,Mie	Elektronik,Polimer	Aluminium	Berbagai btk	Sibolangit
3.LANGKAT		Adhesive			Bukit Lawang
4.ASAHAN	Edible				
5. LABUHAN BATU	The olahan		Aluminium		Prapat
6. SIMALUNGUN					
7. KARO	Markisah,Aqua				
8. BINJAI	Kaleng				Brastagi,Tahura
9. TEBING TINGGI					
10. TANJUNG BALAI	Edible			Berbagai btk	
11. PEMATANG SIANTAR	Rokok			Berbagai btk	
12. DAIRI					
13. TOBA SAMOSIR	Pulp				
14.TAPANULI UTARA					
15.MANDAILING NATAL					
16.TAPANULI SELATAN					
17.TAPANULI TENGAH					
18. SIBOLGA					
19. NIAS					Selancar

Dinas-dinas di Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 1999

No.	D i n a s	Medan	Binjai	Tebing Tinggi	Pematang Siantar	Tanjung Balai	Sibolga
1	Pendapatan	v	v	v	v	v	v
2	Pekerjaan Umum Daerah	v	v	v	v	v	v
3	Pariwisata	v	v	-	-	-	-
4	LLAJ	v	v	v	v	v	v
5	Kesehatan	v	v	v	v	v	v
6	Pertanian	v	v	v	v	v	-
7	P & K	v	v	v	v	v	v
8	Pasar	-	v	v	v	v	-
9	Peternakan	v	v	v	v	v	-
10	Perkebunan	-	-	-	-	-	-
11	Kebersihan & Pertamanan	v	v	v	v	v	v
12	Perindag	v	v	v	v	v	v
13	Perk. & Konservasi Tan.	-	-	-	-	-	-
14	Perikanan	v	-	-	-	v	v
15	Kehutanan	-	-	-	-	-	-
16	Tata Bangunan	v	-	-	v	-	-
17	Perumahan	-	v	-	-	-	-
18	Tata Kota	v	v	-	v	v	v
19	Kebakaran	-	v	-	v	-	-
20	Penertiban	v	-	-	-	-	-
21	P2K	v	-	-	-	-	-
22	Peralatan	v	-	-	-	-	-
23	Pertambangan	-	-	-	-	-	-
24	Pengairan	-	-	-	-	-	-
25	Koperasi & PPK	-	-	-	-	-	-
26	Sosial	-	-	-	-	-	-
27	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-

Dinas-dinas di Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 1999

Hasil Penilaian Setiap Dati II Dalam Otonomi Daerah

No.	Dati II			Variabel Pokok				Administrasi & Organisasi	Total Score	Ranking Dati II Se-Sumut
		Keuangan	Aparatur	Partisipasi Masyarakat	Ekonomi Daerah	Demografi				
Kotamadya										
1	Medan	30	20	20	18	10	12	12	110	1
2	Pematangsiantar	20	20	16	18	10	12	96	ii	
3	Tebing Tinggi	10	20	16	18	10	8	82	iii	
4	Binjai	10	16	16	18	10	12	82	iii	
5	Sibolga	10	20	12	18	10	10	80	v	
6	Tanjung Balai	10	20	8	18	8	10	74	vii	
Kabupaten										
1	Asahan	15	20	8	18	8	12	81	iv	
2	Deli Serdang	15	16	12	18	8	12	81	iv	
3	Tapanuli Selatan	10	20	12	18	6	10	76	vi	
4	Simalungun	10	16	12	18	8	12	76	vi	
5	Karo	15	20	8	15	8	10	76	vi	
6	Labuhan Batu	10	16	12	18	8	12	76	vii	
7	Langkat	10	16	12	18	8	10	74	vii	
8	Tapanuli Utara	15	16	12	15	6	10	74	vii	
9	Tapanuli Tengah	5	20	8	18	6	10	67	viii	
10	Nias	10	20	8	15	4	10	67	viii	
11	Dairi	5	20	8	18	6	8	65	ix	

Keuangan:

1. % PAD thd total pendapatan
2. Nilai Absolut

Aparatur:

1. Ratio Jlh pegawai thd jlh penduduk
2. Masa kerja
3. Golongan pegawai
4. Pendidikan formal
5. Pendidikan Teknis fungsional & perjenjang

Partisipasi Masyarakat:

1. Bid. Pembangunan desa
2. Bid. Pendidikan
3. Bid. Kesehatan
4. Bid. Pelayanan sosial

Demografi:

1. Kepadatan penduduk
2. Pertumbuhan penduduk
3. Penduduk Buta huruf
4. Rasio ketergantungan
5. Pendidikan penduduk usia sekolah
6. Tingkat pendidikan yang ditempuh
7. Distribusi lapangan kerja

- Administrasi & Organisasi:
1. Mengelai organisasi & administrasi
 2. Urusan rumah tangga daerah

6 (enam) Variabel Pokok Yang Digunakan Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah

1. Kemampuan Keuangan :

- a). % PAD thd total pendapatan
- b). Nilai Absolut

4. Kemampuan Ekonomi Daerah :

- a). Pendapatan per kapita
- b). Indeks perkembangan pendapatan per kapita
- c). Struktur PDRB

2. Kemampuan Aparatur :

- a). Ratio Jlh pegawai thd jlh penduduk
- b). Masa kerja
- c). Golongan pegawai
- d). Pendidikan formal
- e). Pendidikan Teknis fungsional & perjenjang

5. Kemampuan Demografi :

- a). Kepadatan penduduk
- b). Pertumbuhan penduduk
- c). Penduduk Buta huruf
- d). Ratio ketergantungan
- e). Pendidikan penduduk usia sekolah
- f). Tingkat pendidikan yang ditamatkan
- g). Distribusi lapangan kerja

3. Kemampuan Partisipasi Masyarakat :

- a). Bid. Pembangunan Desa
- b). Bid. Pendidikan
- c). Bid. Kesehatan
- d). Bid. Pelayanan Sosial

6. Kemampuan Administrasi & Organisasi :

- a). Mengenai organisasi & administrasi
- b). Urusan rumah tangga daerah

Tabel 4.1. Hasil Penilaian Setiap Dati II Dalam Otonomi Daerah

No.	Dati II	Variabel Pokok					Total Score	Ranking Dati II Se-Sumut
		Keuangan	Aparatur	Pertumbuhan Masyarakat	Ekonomi Daerah	Demografi		
Kotamadya	1 Medan	30	20	20	18	10	12	110 I
	2 Pematangsiantar	20	20	16	18	10	12	95 ii
	3 Tebing Tinggi	10	20	16	18	10	8	82 iii
	4 Binjai	10	16	16	18	10	12	82 iii
	5 Sibolga	10	20	12	18	10	10	80 v
	6 Tanjung Balai	10	20	8	18	8	10	74 vii
Kabupaten	1 Asahan	15	20	8	18	8	12	81 iv
	2 Deli Serdang	15	16	12	18	8	12	81 iv
	3 Tapanuli Selatan	10	20	12	18	6	10	76 vi
	4 Simalungun	10	16	12	18	8	12	76 vi
	5 Karo	15	20	8	15	8	10	76 vi
	6 Labuhan Batu	10	16	12	18	8	12	76 vii
	7 Langkat	10	16	12	18	8	10	74 vii
	8 Tapanuli Utara	15	16	12	15	6	10	74 vii
	9 Tapanuli Tengah	5	20	8	18	6	10	67 viii
	10 Nias	10	20	8	15	4	10	67 viii
	11 Dairi	5	20	8	18	6	8	65 ix

Analisis SWOT Desentralisasi di Daerah Propinsi Sumatera Utara

	STRENGTHS - S (Kekuatan)	WEAKNESSES - W (Kelemahan)
	1. Sumber Daya Alam 2. Sumber Daya Olahan (Agribisnis dan Manufaktur) 3. Sumber Daya Manusia 4. Sarana dan Prasarana 5. Perdagangan 6. Dunia Usaha 7. IPTEK 8. Dinamika & Sinergi Kemajemukan	1. Kesiapan birokrasi menerima perubahan. 2. Stabilitas 3. Kemampuan fiskal setiap daerah Kabupaten/Kota 4. Kemampuan Manajerial 5. Jaringan Sifo termasuk DBA 6. Bertumpuknya potensi di pantai bagian timur.
OPPORTUNITIES - O (Peluang)	SO STRATEGIES (Strategi SO)	WO STRATEGIES (Strategi WO)
1. UU Otonomi Daerah 2. PMA / PMDN & BUMN 3. IMT-GT & AFTA, globalisasi 4. Borrowing dari luar negeri 5. Transfer SDM profesional 6. Teknologi informasi / komunikasi	1. Peningkatan komoditi unggulan agribisnis 2. Membuat UU dan Peraturan yang stabil dan predictable 3. Meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan research teknologi terapan	1. Sosialisasi tentang visi dan misi otonomi di setiap daerah 2. Meningkatkan jiwa enterpreneurship dikalangan birokrat dan masyarakat 3. Melakukan studi perimbangan fiskal setiap daerah Kabupaten / Kota
THREATS - T (Ancaman)	ST STRATEGIES (Strategi - ST)	WT STRATEGIES (Strategi - WT)
1. Disintegrasi NKRI 2. Distribusi kewenangan fungsi serta otoritas belum terasa keadilan & fairness (PP 25/2000) 3. Formulasi perimbangan fiskal 4. UU No. 18/1997 yang belum terasa equity dan equality 5. Cemaran watak feodalistik dalam pemerintahan Pusat - Propinsi - Kabupaten/Kota - desa. 6. Pemilihan DPR/DPRD yang belum sistem distrik	1. Meminimisasi ego daerah dan ego sektoral 2. Menciptakan birokrasi dan reformasi yang memfokuskan diri kepada kualitas & kecepatan pelayanan 3. Proses rekrutmen dan jalur karier yang predictable	1. Menciptakan kaitan yang erat antara gaji, produktivitas dan profesionalisme 2. Mengurangi kesenjangan sosial dengan menciptakan kelas ekonomi menengah yang kuat 3. Menginventarisasi peningkatan kemampuan fiskal setiap daerah.

5

STRATEGI IMPLEMENTASI DESENTRALISASI

A. Proses Desentralisasi

Proses Desentralisasi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Ditinjau dari segi Hirarki (Tingkat Pusat/Tingkat I (Propinsi)), Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), maka langkah pertama penekanan Desentralisasi diutamakan dahulu ke Daerah Tingkat I, baru secara bertahap ke Daerah Tingkat II. Apabila ditinjau dari segi kemenangan fungsi (menyangkut dinas), maka ini perlu pengkajian yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan Nasional, Internasional, lingkungan, kebutuhan bersama, serta pengembangan Fiskal.

Lankah yang perlu dilakukan antara lain :

- o Sosialisasi visi dan misi Desentralisasi di daerah.
- o Sosialisasi kesiapan para birokrat untuk menerima perubahan.
- o Membuat undang-undang dan peraturan yang stabil dan predietable.

B. Transfer of Personal

Dalam melakukan transfer of personalia pada tahap awal perlu dilakukan Restrukturisasi Organisasi baik di tingkat pusat, propinsi (Tingkat I) dan tingkat II, yang dilengkapi dengan uraian jabatan dan persyaratan jabatan, yang lebih didasari oleh kempetensi dan profesionalisme.

Dilihat dari kondisi Sumatera Utara jumlah pegawai Dinas saat ini sebesar 93.096 orang, dimana 38,44 % pegawai laki-laki dan 58,40% pegawai wanita. Kalau dilihat dari jumlah penduduk rasionya 1 : 124, dan ditinjau dari segi pendidikan tamatan SD (5,48%), SLTP (1,99%), SLTA (84,89%), Diploma (4,51%), S1 (3,36%), S2 (0,07%).

Langkah-langkah yang dilakukan:

- o Rationalitas kebutuhan Dinas di setiap Daerah Tingkat II.
- o Penyempurnaan Struktur Organisasi.
- o Menciptakan kondisi agar ego daerah, ego sektoral dan ego disiplin menjadi minimum.
- o Menciptakan birokrasi dan reformasi yang memfokuskan diri kepada kualitas dan kecepatan pelayanan.
- o Pelatihan kemampuan kompetensi dan profesionalisme para pegawai pemerintahan.

C. Intergovermental Fiskal Transfer

Dalam menetapkan formula yang menjadi point kunci adalah :

- a. Prinsip Penerimaan.

Sistem penerimaan harus memperhatikan :

- o Keseimbangan
- o Kewenangan yang jelas
- o Penyetaraan kepentingan bersama

- b. Authority di dalam mengelola penerimaan

Kebijakan Desentralisasi Fiskal, sebaiknya disertai dengan Authority di dalam penerimaan Fiskal.

Langkah-langkah yg perlu dilakukan :

- o Pembinaan pengaturan Management Penerimaan Pajak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- o PPn dan PPh
Pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, agar diatur pembagiannya oleh pusat dan daerah sesuai dengan prinsip kedekatan dengan masyarakat.
- o Undang-undang Pajak Penerimaan
Menegakkan undang-undang pajak penerimaan, baik yang mengelola penerimaan pajak maupun pembayar pajak, sehingga terjadi proses pendidikan perubahan moral yang mengurangi korupsi.

- o Prioritas bagi daerah adalah meningkatkan kemampuan penerimaan daerah.
Pemerintah Daerah : f (PAD, Retribusi, PPn, PPh, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah).

Untuk meningkatkan penerimaan tersebut, prioritas yang dilakukan antara lain :

- Melakukan Diversifikasi usaha yang menjadi unggulan daerah (Sumatera Utara adalah agribisnis).
- Melakukan inventarisasi objek pajak meliputi luasan, standard perhitungan, dunia usaha (Sumatera Utara terutama pada sektor perkebunan).
- Mengoptimalkan kemampuan unsur Dinas Pendapatan.
- Memperbaiki sistem pelayanan masyarakat.

D. Division of Intergovermental Function and Activities

Pembagian fungsi dan aktivitas yang tepat antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/Kota perlu dilakukan studi yang lebih mendalam sesuai dengan hirarki dan matrix kebutuhannya.

Untuk Dinas Tingkat II kondisi Sumatera Utara pada setiap daerah tingkat dapat dilihat pada lampiran.

E. Effective Govermance

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan akuntabilitas tingakt daerah dan DPRD antara lain :

- Inventarisasi kemampuan SDM disertai dengan ratio kebutuhannya.
- Meningkatkan jiwa enterpreneurship di kalangan birokrat
- Proses rekrutment dan pembinaan jalur karier yang lebih rasional dikalangan aparatur pemerintah
- Mengkaji ulang asset pemerintah yang produktif
- Menata kembali lembaga pemerintahan sehingga lebih berorientasi kepada efisiensi dan efektifitas (optimasi)
- Menciptakan kaitan yang erat antara gaji, produktivitas dan profesionalisme, tidak hanya didasari kebutuhan physik minimum.

P E N U T U P

- Dilihat dari segi Potensi Sumber Daya Alam, Daerah Tingkat I Sumatera Utara cukup mampu untuk menjalankan sistem Desentralisasi, hanya saja dari semua pihak, baik Aparatur Pemerintah, wiraswasta, baik ditingkat Pusat, Tingkat I dan Tingkat II, sudah siap untuk menerima perubahan, dan menjalankan schedule perubahan tersebut secara sistematis.
- Penghambat dari suatu sistem perubahan umumnya disebabkan :
 - Ketidakpastian akan sebab akibat perubahan
 - Keengganahan untuk melupakan keuntungan/kesenangan yang telah diperoleh saat ini
 - Menyadari kelemahan perubahan yang diajukan

LAMPIRAN

PEMERINTAH

**UU NO. 22 /1999 &
PP NO. 25/2000.**

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

OTONOMI | **DESKONSENTRASI**

UU NO. 22/1999.

DAERAH KABUPATEN / KOTA

KEWENANGAN OTONOMI

**11 KEWENANGAN FUNGSIONAL &
FISKAL**

**[KEWENANGAN, KELEMBAGAAN, PERSONALIA, KEUANGAN DAERAH, PERLENGKAPAN/
ASET,DPRD, PELAYANAN PUBLIK.**

Tabel 2-7. Kontribusi PAD terhadap Belanja Rutin Sumatera Utara selama 3 tahun (1996/1997 s/d 1998/1999)
(Rp. 000,-)

No	Daerah Kabupaten/Kota	PAD		Rata-rata PAD		BELANJA RUTIN		Rata-rata PAD		Persen (%)	Persen (%)
		1996/1997	1997/1998	1998/1999	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1996/1997	1997/1998		
Kabupaten											
1	Nias	1,276,080	1,398,724	1,558,077	1,410,960	10,50	10,012,857	11,216,622	11,802,615	12,891,982	8.62
2	Tapanuli Selatan	3,255,727	3,882,127	2,276,940	3,138,265	-11,05	22,060,061	24,961,497	78,723,363	46,099,323	14,27
3	Tapanuli Tengah	1,346,696	1,501,200	1,632,741	1,493,546	10,12	6,150,327	7,142,893	21,560,095	13,609,169	10,97
4	Tapanuli Utara	4,311,200	4,843,836	5,693,520	4,949,519	14,95	15,511,023	18,340,899	68,456,028	40,702,013	145,74
5	Labuhan Batu	4,488,535	5,037,557	3,125,541	4,217,211	-12,86	16,013,087	21,283,214	51,429,927	35,198,353	87,28
6	Asahan	3,167,167	3,522,629	4,326,412	3,672,069	17,02	18,342,611	24,549,471	59,859,421	39,146,599	88,84
7	Simalungun	4,297,931	5,100,717	5,645,375	5,014,674	14,68	58,257,579	74,759,829	75,293,812	76,123,311	14,52
8	Dairi	1,137,326	1,293,495	1,534,888	1,321,903	16,20	8,457,546	8,537,582	24,578,438	15,620,398	94,42
9	Karo	3,577,101	4,273,126	4,499,233	4,116,487	12,37	11,577,000	12,610,000	13,318,000	17,990,320	7,27
10	Deli Serdang	8,311,503	11,974,293	14,822,509	11,702,768	33,93	25,948,355	29,201,803	90,333,162	64,098,142	10,94
11	Langkat	3,476,969	6,564,080	6,639,178	5,560,076	44,97	16,524,011	24,501,904	56,649,166	39,971,810	89,74
12	Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daerah Kota											
14	Sibolga	1,363,554	1,467,646	1,503,235	1,444,812	5,03	7,180,283	8,594,526	10,067,248	10,540,436	18,42
15	Tanjung Balai	2,055,456	2,445,219	2,636,725	2,379,133	13,40	6,119,717	6,866,148	12,733,132	11,745,181	48,82
16	Pematang Siantar	4,537,221	4,928,119	5,906,554	5,123,965	14,23	11,606,338	13,184,301	26,954,268	24,080,260	59,02
17	Tebing Tinggi	1,690,012	1,824,843	2,256,189	1,923,681	15,81	6,470,418	7,605,577	14,240,032	12,003,923	52,38
18	Medan	54,422,739	67,493,614	55,365,895	59,094,083	3,02	100,067,163	112,084,259	104,060,562	184,196,106	2,43
19	Binjai	2,496,003	2,779,974	2,957,665	2,744,547	8,88	8,540,911	9,649,273	20,757,739	16,642,040	64,05
Sumatera Utara		105,211,220	130,331,199	122,380,677	119,307,699	8,89	348,839,287	415,090,798	740,817,008	660,659,299	48,73

Sumber : BPS-SU

Tabel 2-8. Kontribusi PAD terhadap Belanja Pembangunan Sumatera Utara selama 3 tahun (1996/1997 s/d 1998/1999)
(Rp. 000,-)

No	Daerah Kabupaten/Kota	PAD		Rata-rata PAD	Persen (%)	BELANJA PEMBANGUNAN		Rata-rata PAD	Persen (%)	(% PAD thp APBD)
		1996/1997	1997/1998			1996/1997	1997/1998			
Kabupaten										
1	Nias	1,276,080	1,398,724	1,558,077	1,410,960	10.50	13,733,305	26,272,136	33,286,384	26,311,892 59.00 5.36
2	Tapanuli Selatan	3,255,727	3,882,127	2,276,940	3,138,265	-11.05	24,513,284	39,554,489	40,149,511	38,923,444 31.43 8.06
3	Tapanuli Tengah	1,346,696	1,501,200	1,632,741	1,493,546	10.12	14,930,288	17,200,892	18,796,205	18,967,193 12.24 7.87
4	Tapanuli Utara	4,311,200	4,843,836	5,693,520	4,949,519	14.95	20,163,433	31,304,982	31,760,329	34,342,273 28.36 14.41
5	Labuhan Batu	4,488,535	5,037,557	3,125,541	4,217,211	-12.86	20,200,105	27,591,703	28,577,924	31,079,521 20.08 13.57
6	Asahan	3,167,167	3,522,629	4,326,412	3,672,069	17.02	21,103,778	21,709,577	28,591,067	28,697,572 17.28 12.80
7	Simalungun	4,297,931	5,100,717	5,645,375	5,014,674	14.68	24,490,319	24,603,433	28,613,679	32,588,714 8.38 15.39
8	Dairi	1,137,326	1,293,495	1,534,888	1,321,903	16.20	9,057,641	11,134,012	11,944,443	12,474,575 15.10 10.60
9	Karo	3,577,101	4,273,126	4,499,233	4,116,487	12.37	10,035,000	14,906,641	12,567,000	17,991,533 16.43 22.88
10	Deli Serdang	8,311,503	11,974,293	14,822,509	11,702,768	33.93	27,762,779	35,971,152	33,496,677	48,013,905 11.34 24.37
11	Langkat	3,476,969	6,564,080	6,639,178	5,560,076	44.97	18,712,441	26,764,236	25,433,477	31,050,167 19.03 17.91
12	Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daerah Kota										
14	Sibolga	1,363,554	1,467,646	1,503,235	1,444,812	5.03	4,870,447	6,077,341	6,391,820	7,706,287 14.98 18.75
15	Tanjung Balai	2,055,456	2,445,219	2,636,725	2,379,133	13.40	6,060,325	7,560,938	8,185,671	10,441,160 16.51 22.79
16	Pematang Siantar	4,537,221	4,928,119	5,906,554	5,123,965	14.23	5,635,733	7,128,294	10,872,359	14,710,753 39.50 34.83
17	Tebing Tinggi	1,690,012	1,824,843	2,256,189	1,923,681	15.81	7,158,617	6,177,778	8,045,562	9,692,233 8.27 19.85
18	Medan	54,422,739	67,493,614	55,365,895	59,094,083	3.02	44,772,575	51,563,980	58,029,870	130,247,586 13.85 45.37
19	Binjai	2,496,003	2,779,974	2,957,665	2,744,547	8.88	6,787,219	7,370,622	10,077,118	11,737,719 22.66 23.38
	Sumatera Utara	105,211,220	130,331,199	122,380,677	119,307,699	8.89	279,987,289	362,892,206	394,819,096	504,976,465 19.20 23.63

3

SITUASI DAN KONDISI PEMERINTAH DAERAH

A. Perwilayahannya

Untuk mengidentifikasi permasalahan dan keadaan daerah dalam rangka melancarkan pelaksanaan dan pengolahan pembangunan, pemerataan dan perencanaan jangka panjang pembangunan, daerah Sumatera Utara terbagi atas wilayah pembangunan pantai barat, dataran tinggi dan pantai. Pembentukan wilayah pengembangan ini terutama memperhatikan faktor geografis, demografis dan potensi alam serta ruang dan saling ketergantungan antar daerah. Untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, daerah Sumatera Utara terbagi atas 4 (empat) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Tiap-tiap SWP dibagi atas Sub-sub Satuan Wilayah (SSWP). Tiap SWP dan SSWP mempunyai sub pusat pembangunan.

Pembagian daerah administrasi menurut luas wilayah, jumlah kecamatan, desa dan kelurahan. Pembagian daerah administrasi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3-1 :

B. SDM Pemerintahan dan Kemampuannya Mengurus Rumah Tangga

Dalam urusan rumah tangga daerah sampai saat ini Sumatera Utara telah memiliki lebih kurang 20 dinas otonom antara lain adalah :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Dinas Kehutanan | - Dinas Pertanian |
| - Dinas Peternakan | - Dinas Perikanan Darat |
| - Dinas P & K | - Dinas Kesehatan |
| - Dinas Perindustrian | - Dinas PU |
| - Dinas Perikanan Laut | - Dinas Sosial |
| - Dinas Perumahan | - Dinas Tenaga Kerja |
| - Dinas LLAJR | - Dinas Perkebunan |
| - Pendapatan | - Dinas PU Bina Marga |
| - Dinas PU Pengairan | - Dinas PU Cipta Karya |
| - Dinas Pariwisata | - Dinas Pertambangan |

Tabel 3-1. Pembagian Daerah Administrasi Menurut Luas Wilayah,
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

No.	Wilayah Pembangunan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah		
			Kecamatan	Kelurahan	Desa
WP-I					
1.	Sibolga	11	3	11	-
2.	Tapanuli Selatan	12.763	15	40	1.488
3.	Tapanuli Tengah	2.188	6	4	136
4.	Nias	5.318	15	6	651
5.	Mandailing Natal	6.134	8	33	266
WP-II					
1.	Pematang Siantar	70	6	29	9
2.	Karo	2.127	13	10	248
3.	Dairi	3.146	12	7	150
4.	Simalungun	4.369	21	12	195
5.	Tapanuli Utara	7.165	29	31	811
6.	Toba Samosir	3.440	-	-	-
WP-III					
1.	Medan	265	21	144	-
2.	Tebing Tinggi	31	3	17	-
3.	Langkat	6.262	17	9	199
4.	Binjai	90	5	19	11
5.	Deli Serdang	4.339	33	17	611
WP-IV					
1.	Tanjung Balai	58	5	4	14
2.	Asahan	4.581	17	19	199
3.	Labuhan Batu	9.323	14	11	182

Sumber : BPS-SU

Pada tahun 1999 banyaknya jumlah pegawai dari dinas-dinas yang ada di Sumatera Utara adalah 95.096 orang, yang terdiri dari 85.805 orang pegawai pusat, 7.291 orang pegawai daerah, dengan perbandingan antara pegawai dinas yang laki-laki dan perempuan adalah 35.784 orang dan 54.369 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara, maka rasio jumlah pegawai negeri sipil untuk dinas-dinas terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 1 : 124 yang berarti setiap satu orang pegawai negeri dinas dapat melayani 124 orang penduduk.

Tabel 3-2. Rasio Jumlah Pegawai Dinas terhadap Jumlah Penduduk Sumatera Utara

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Jumlah Penduduk	Jumlah PNS	Komposisi PNS				Rasio (C : D)
				Pusat	Daerah	L	P	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nias	688.400	5.139	4.980	159	3.792	1.347	1 : 134
2	Tapanuli Selatan	753.300	6.865	6.423	442	4.044	2.821	1 : 85
3	Tapanuli Tengah	256.600	2.676	2.509	167	1.159	1.517	1 : 96
4	Tapanuli Utara	424.400	4.840	4.557	283	2.242	2.598	1 : 88
5	Labuhan Batu	906.600	5.825	5.412	413	2.282	3.543	1 : 156
6	Asahan	957.500	7.513	7.158	355	2.649	4.864	1 : 127
7	Binjai	222.300	2.195	1.947	248	691	1.504	1 : 101
8	Dairi	302.000	3.381	3.133	248	1.570	1.811	1 : 89
9	Karo	286.300	3.663	3.372	291	1.328	2.335	1 : 78
10	Deli Serdang	1.920.000	15.488	14.730	758	5.158	10.330	1 : 124
11	Langkat	889.500	7.792	7.303	489	2.905	4.887	1 : 114
12	Mandailing Natal	372.400	2.965	2.841	124	1.456	1.509	1 : 126
13	Toba Samosir	302.900	648	558	90			1 : 467
14	Tanjung Balai	117.300	1.000	777	223	325	675	1 : 117
15	Pematangsiantar	237.900	2.229	1.870	359	671	1.558	1 : 107
16	Tebing Tinggi	138.400	1.230	1.064	166	392	838	1 : 113
17	Sibolga	81.000	846	730	116	259	587	1 : 96
18	Medan	2.028.300	9.050	7.599	1.451	2.616	6.434	1 : 224
19	Simalungun	869.000	9.751	8.842	909	3.570	6.181	1 : 89
	Sumatera Utara	11.754.100	93.096	85.805	7.291	35.784	54.369	1 : 124

Sumber : Pemda Sumatera Utara

Bila dilihat dari persentase komposisi pegawai dinas, terlihat bahwa jumlah pegawai dinas pusat ada sebanyak 92,17 %, pegawai dinas daerah sebanyak 7,83 %. Sedangkan persentase pegawai dinas laki-laki terhadap jumlah pegawai dinas ada senyak 38,44 % dan perempuan sebanyak 58,40 %.

Persentase komposisi pegawai dinas di daerah Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 3-3 berikut ini :

Tabel 3-3. Persentase Komposisi Pegawai Dinas di daerah Sumatera Utara

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Jumlah P.Dinas	Komposisi Pegawai Dinas							
			Pusat	(%)	Daerah	(%)	L	(%)	P	(%)
1	Nias	5139	4980	96.91	159	3.09	3792	73.79	1347	26.21
2	Tapanuli Selatan	6865	6423	93.56	442	6.44	4044	58.91	2821	41.09
3	Tapanuli Tengah	2676	2509	93.76	167	6.24	1159	43.31	1517	56.69
4	Tapanuli Utara	4840	4557	94.15	283	5.85	2242	46.32	2598	53.68
5	Labuhan Batu	5825	5412	92.91	413	7.09	2282	39.18	3543	60.82
6	A s a h a n	7513	7158	95.27	355	4.73	2649	35.26	4864	64.74
7	B i n j a i	2195	1947	88.70	248	11.30	691	31.48	1504	68.52
8	D a i r i	3381	3133	92.66	248	7.34	1570	46.44	1811	53.56
9	K a r o	3663	3372	92.06	291	7.94	1328	36.25	2335	63.75
10	Deli Serdang	15488	14730	95.11	758	4.89	5158	33.30	10330	66.70
11	L a n g k a t	7792	7303	93.72	489	6.28	2905	37.28	4887	62.72
12	Mandailing Natal	2965	2841	95.82	124	4.18	1456	49.11	1509	50.89
13	Toba Samosir	648	558	86.11	90	13.89	-	-	-	-
14	Tanjung Balai	1000	777	77.70	223	22.30	325	32.50	675	67.50
15	Pematangsiantar	2229	1870	83.89	359	16.11	671	30.10	1558	69.90
16	Tebing Tinggi	1230	1064	86.50	166	13.50	392	31.87	838	68.13
17	S i b o l g a	846	730	86.29	116	13.71	259	30.61	587	69.39
18	M e d a n	9050	7599	83.97	1451	16.03	2616	28.91	6434	71.09
19	Simalungun	9751	8842	90.68	909	9.32	3570	36.61	6181	63.39
	Sumatera Utara	93096	85805	92.17	7291	7.83	35784	38.44	54369	58.40

Sumber : Pemda Sumatera Utara

Dilihat dari kondisi kepegawaian menurut tingkat pendidikannya adalah bahwa jumlah pegawai dinas dengan pendidikan tamat Perguruan Tinggi (D-3, S-1, dan S-2) masih sangat kurang (terlalu sedikit). Sedangkan yang mendominasi pegawai dinas bila dilihat dari tingkat pendidikannya adalah dari SLTA dengan persentase sebesar 84,89 %. Untuk jelasnya, persentase jumlah pegawai dinas terhadap tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 3-3 berikut :

Tabel 3-3. Persentase Jumlah Pegawai Dinas terhadap Tingkat Pendidikannya

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Jumlah PNS (orang)	Tingkat Pendidikan					
			SD (%)	SLTP (%)	SLTA (%)	Diploma (%)	S-1 (%)	S-2 (%)
1	Nias	5.139	6,67	2,59	86,87	2,51	1,34	0,02
2	Tapanuli Selatan	6.865	6,79	1,43	83,64	3,76	4,36	0,01
3	Tapanuli Tengah	2.676	5,94	2,20	86,29	3,14	2,65	0,04
4	Tapanuli Utara	4.840	5,17	3,41	80,74	3,99	2,07	0,76
5	Labuhan Batu	5.825	7,83	2,03	83,19	5,30	1,63	0,02
6	Asahan	7.513	5,79	2,95	80,01	7,97	2,78	0,03
7	Binjai	2.195	6,06	2,00	71,71	13,30	6,92	0,05
8	Dairi	3.381	0,71	4,32	21,24	0,56	1,57	0,03
9	Karo	3.663	5,13	1,20	83,27	7,45	2,95	0,00
10	Deli Serdang	15.488	4,91	2,45	86,89	2,84	2,85	0,05
11	Langkat	7.792	6,76	1,81	85,06	3,50	2,86	0,00
12	Mandailing Natal	2.965	5,83	1,59	86,58	3,58	2,39	0,03
13	Toba Samosir	648	-	-	-	-	-	-
14	Tanjung Balai	1.000	6,70	3,10	70,70	13,80	5,70	0,00
15	Pematangsiantar	2.229	4,07	2,87	75,95	11,98	5,16	0,00
16	Tebing Tinggi	1.230	7,56	0,98	84,88	2,20	4,39	0,00
17	Sibolga	846	6,15	3,43	72,46	14,18	3,78	0,00
18	Medan	9.050	4,45	2,01	80,83	3,62	8,99	0,09
19	Simalungun	9.751	5,73	2,15	86,19	3,56	2,36	0,01
	Sumatera Utara	93.096	5,38	1,99	84,89	4,31	3,36	0,07

Sumber : Pemda Sumatera Utara

4

KESIAPAN PEMDA MENYONGSONG DESENTRALISASI

Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 dalam upaya mengubah wajah sistem sentralistik menjadi desentralisasi dalam kehidupan berbangsa bagi bangsa Indonesia memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi kewenangan, kelembagaan, personalia, keuangan daerah, perlengkapan/asset, DPRD dan pelayanan publik.

Dengan adanya PP No. 25/2000 sebenarnya secara relatif telah jelas batas kewenangan pemerintah, pemerintah daerah Propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota tentang jumlah, jenis, batas dan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki masing-masing. Dengan diundang-kannya PP No. 25/2000 tersebut sebagai penjabaran pelaksanaan UU No. 22/1999 sebenarnya telah jelas distribusi fungsi dan tanggung jawab yang harus dipenuhi pemerintah, pemerintah daerah Propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota baik mengenai ketentuan yang harus dipenuhi masing-masing tingkat pelaksanaan termasuk otoritas masing-masing fungsi tanpa meninggalkan hubungan masing-masing otoritas pada masing-masing tingkat pelaksanaan.

Kewenangan tersebut tentunya tidak hanya dalam batas kewenangan fungsional, tetapi juga diikuti kewenangan fiskal. Kewenangan fiskal dalam hubungan desentralisasi meliputi *expenditure assigment, revenue assigment, transfer assigment dan borrowing assigment*.

Dalam kasus 19 daerah Kabupaten/Kota di daerah propinsi Sumatera Utara yang sangat berbeda tajam perbedaan kemampuan potensi dalam menjalankan kewenangan fiskal tersebut untuk menjalankan kewenangan fungsional sebagai daerah otonomi. Disamping perbedaan potensi yang dimiliki, pada umumnya pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara fisik belum ada langkah-langkah persiapan untuk menerima kewenangan tersebut apabila dihubungkan dengan tugas utama pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan ke masyarakat. Hal ini dapat diamati dalam berbagai friksi dalam pemilihan Kepala Daerah yang belum berorientasi kepada prinsip *creating local political support*; demikian juga belum ada upaya *developing brain power* dengan kriteria yang obyektif.

Hal terakhir ini malah ditakutkan akan terjadi friksi baru apabila nantinya dilaksanakan perpindahan personalia baik secara vertikal, horizontal maupun antar daerah dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 termasuk PP No. 25/2000. Apabila hal ini tidak disadari bagaimana mungkin dapat diberdayakan kemampuan fiskal berdasarkan prinsip desentralisasi daerah tersebut, karena ketidakpastian pelayanan pada masyarakat serta aturan yang jelas untuk menarik investasi dalam upaya meningkatkan *revenue*.

Desentralisasi bukan hanya kewenangan fungsional, tetapi dukungan fiskal dalam bentuk *revenue* untuk mendukung segala bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut. *Revenue* dapat ditingkatkan melalui peningkatan potensi keunggulan komperatif, tetapi dengan bantuan dunia usaha untuk mengubah keunggulan komperatif tersebut menjadi keunggulan diferensial. Kegiatan dunia usaha baik dalam sektor agribisnis, pariwisata, manufaktur, perdagangan dan bentuk jasa lainnya yang akan menghasilkan upaya peningkatan perpajakan (*tax effort*) dan kemampuan perpajakan (*tax-able capacity*).

Oleh karena desentralisasi merupakan proses agar tidak terulang kegagalan dalam pelaksanaan desentralisasi yang telah dilakukan di Rusia, Brasilia, Argentina misalnya ; maka hendaknya pemerintah daerah Propinsi disamping memiliki kewenangan otonomi juga deskonsentrasi (pelimpahan kewenangan pemerintah di daerah) memiliki inisiatif dalam menghadapi desentralisasi. Desentralisasi tidak mungkin ditunda, tetapi harus dimengerti daerah Kabupaten/Kota bahwa untuk mencapainya perlu suatu proses untuk mendapatkan suatu kesiapan sekaligus kemampuan untuk menjalankan kewenangan fungsional dan kewenangan fiskal. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus menyadari bahwa telah jelas berdasarkan UU No. 22/1999 dan PP No. 25/2000 mengenai tugas pelayanan terhadap masyarakat termasuk otoritas serta pembiayaan yang harus disusun berdasarkan *expenditure* tergantung pada *revenue* yang diperoleh secara kreatif yang inovatif.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki 11 kewenangan fungsional yang dengan adanya PP No. 25/2000 telah jelas implikasi budget yang harus ditanggung daerah Kabupaten/Kota tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak hanya menunggu subsidi, tetapi harus kreatif. *Borrowing assigment* tidak mungkin digunakan untuk maksud-maksud pembiayaan rutin, melainkan harus untuk hal-hal yang produktif ; kecuali Indonesia mau mengulangi pengalaman Argentina.

Dalam hal ini diperlukan adanya investasi di daerah tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten/Kota tersebut. Dalam kasus daerah Propinsi Sumatera Utara yang mengandalkan sektor perkebunan menjadi suatu kajian khas pula berdasarkan PP No. 25/2000, yang terasa semangat desentralisasi dalam perkebunan terasa dilakukan “setengah hati”, yang mana berujung pada pencarian investasi setengah hati pula serta berakibat tertanggungnya *revenue* daerah Propinsi maupun daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3 (5) butir 4 f bahwa penyusunan perwilayahannya, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota, maka kewenangan otonomi pada daerah Propinsi. Hanya saja Pasal 2 (3) butir 4 h bahwa Pemerintah memiliki kewenangan mengenai penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan perkebunan.

Daerah Propinsi Sumatera Utara termasuk daerah Kabupaten/Kota setelah memproduksi hasil primer minyak kelapa sawit dan inti sawit tidak memiliki wewenang untuk mengolahnya ke industri hilir tanpa ijin dari pemerintah. Daerah memang diberi wewenang mencari investor atau *borrowing* untuk membuat BUMD misalnya, tetapi kalau pemerintah daerah Propinsi ataupun Kabupaten/Kota ingin mengembangkan industri hilir minyak kelapa sawit menjadi industri *edible oil* (minyak goreng, margarin, bahan pengganti mentega kakao, mentega putih dan sebagainya) dan oleo kimia tidak mungkin tanpa ijin pemerintah. Inilah indahnya kreativitas yang inovatif untuk meningkatkan *revenue* dari pemerintah daerah Propinsi termasuk Kabupaten/Kota “terpasung” oleh PP No. 25/2000. Demikian juga halnya dengan hasil industri primer hutan, yakni pulp, kayu lapis, wood working termasuk hilirnya seperti kertas, rayon, surfaktan dan lainnya.

A. KONSEKUENSI DAN RANIFIKASI DESENTRALISASI

Perubahan sistem sentralistik menjadi desentralistik memberikan batasan kewenangan fungsional serta kewenangan fiskal terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah memiliki tugas utama pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan sumber dana untuk membiayainya baik dalam bentuk belanja rutin maupun biaya pembangunan. Dengan di undangkannya UU.No.22/1999 serta PP.No.25/2000, maka sebagai konsekuensinya baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mencari sumber dana baik melalui bentuk penerimaan asli daerah, pajak, transfer, hibah maupun pinjaman (borrowing).

Penggalian revenue untuk dibelanjakan untuk pembelian rutin serta pembangunan sesuai dengan otoritas dari kewenangan fungsional yang dimiliki daerah otonom memerlukan terobosan yang inovatif untuk dapat memanfaatkan seoptimal mungkin segala bentuk potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Dalam kaitan ini diperlukan berbagai bentuk fasilitas dalam bentuk prasarana serta sarana dan regulation yang memberikan kenyamanan berusaha untuk menarik investor melakukan investasi. Tingginya tingkat kegairahan investasi di suatu daerah otonomi akan memberikan peningkatan penerimaan daerah otonomi tersebut melalui berbagai pemasukan dari obyek pajak. Tingginya kegairahan investasi tidak hanya ditentukan oleh perubah keunggulan komperatif sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tetapi juga disukung oleh prasarana dan sarana berusaha yang disertai kepastian regulation. Konsekuensi dari hal tersebut DPRD dan Pemerintah Daerah Otonomi tersebut harus melihat pengelolaan sistem desentralistik yang memerlukan suatu sistem pemerintahan yang berjiwa enterpreneurship. Dalam hubungan ini kualitas sumber daya manusia dari Pemerintah daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan kunci utama dalam meningkatkan kemampuan daerah otonomi dalam menjalankan sistem pemerintahan desentralistik secara berkelanjutan. Akibat dari hal ini akan terjadi transfer personalia dari suatu daerah ke daerah lain secara alami demi usaha daerah tersebut untuk meningkatkan revenue. Dalam awal diundangkan serta diberlakukan UU.No.22/1999 termasuk PP.No.25/2000, mungkin saja transfer personalia seperti hal tersebut dianggap tidak bermanfaat serta mengurangi peluang personalia yang dimiliki daerah otonomi tersebut. Hanya saja hambatan yang diberikan suatu daerah untuk menutup diri terhadap personalia yang bukan berasal dari daerah itu sendiri, apabila setelah

dilakukan benchmarking terhadap kesuksesan daerah otonomi lainnya maka akan diperlukan keterbukaan bagi tenaga profesional yang berasal dari daerah lain.

Dalam kasus daerah Propinsi Sumatera Utara yang memiliki 19 daerah Kabupaten/Kota yang tersebar dibagian pantai timur yang secara tradisional semenjak era sebelum merdeka merupakan daerah perkebunan merupakan pusat kegiatan perdagangan, pendidikan serta ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut (Pangkalan Susu, Belawan, Kuala Tanjung dan Teluk Nibung Tanjung Balai) serta bandar udara memiliki perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan daerah bagian pantai barat. Migrasi penduduk terjadi dari bagian pantai barat yang dikenal pada zaman penjajahan Belanda sebagai Kresidenan tapanuli menuju bagian pantai timur yang dikenal sebagai Kresidenan Sumatera Timur dengan dua kota terbesarnya yakni Medan dan Pematang Siantar. Disamping terjadinya migrasi lokal tersebut, karena dibukanya daerah perkebunan dibagian pantai timur tersebut maka didatangkan tenaga kerja oleh pemerintah kolonial pada waktu itu dari pulai Jawa, Cina dan etnis Tamil dari sub-kontinen India. Daya tarik perkebunan serta hubungan dagang yang dekat dengan pulai Pinang serta Singapura juga menarik etnis lain dari Aceh, Minangkabau serta Banjar untuk memasuki daerah pantai timur dari daerah Propinsi Sumatera Utara. Konsekuensi dari migrasi penduduk tersebut membuat daerah pantai timur menjadi multi etnis serta plural dalam agama sangat terbuka terhadap kedatangan sumber daya manusia dari mana saja sejauh memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini dapat kita lihat bahwa daerah Tanah Jawa di Kabupaten Simalungun yang dihuni etnis Jawa dan etnis Batak Toba yang ulet dalam pertanian yang beririgasi serta mengubah daerah ini menjadi gudang beras daerah Propinsi Sumatera Utara . Demikian juga halnya dengan kegiatan agribisnis komoditi hortikultura di daerah Kabupaten Karo serta bagian Simalungun Atas dari daerah Kabupaten Simalungun terjadi sinergi yang saling menguntungkan antara etnis pendatang (etnis Jawa dan etnis Batak Toba) dengan etnis tempatan (etnis Karo dan etnis Simalungun). Hal ini berbeda dengan yang terjadi di daerah pantai barat yang belum memiliki tradisi beratus tahun untuk dapat menerima kedatangan etnis lain untuk bersama-sama mengembangkan usaha di daerah tersebut. Sebagai contoh dari hal ini dapat dicermati dari permasalahan PT. Inti Indorayon Utama yang membuka pabrik pulp dan rayon di Porsea di daerah Kabupaten Toba Samosir. Disamping maslaah limbah, maka yang mencuat kepermukaan adalah maslah belum siapnya terjadi pergeseran antara etnis tempatan dengan etnis pendatang. Dalam hubungan inilah perlunya dicermati transfer personalia sebagai konsekuensi diberlakukannya sistem

desentralistik di beberapa daerah Kabupaten di Propinsi Sumataera Utara, disamping terjadinya transfer secara vertikal disebabkan adanya sistem sentralistik menjadi desentralistik biarpun pada tingkat daerah Propinsi masih ada deskonsentrasi tetapi kelembagaan Kanwil tentunya akan lebur dengan Kantor Dinas sesuai dengan jiwa semangat desentralisasi. Harus juga dicatat dengan diberlakukannya UU.No.22/1999 dan PP.No.25/2000, maka belum tentu semua Kantor Dinas difungsikan baik yang terkait dengan kewenangan fungsional otonom maupun deskonsentrasi. Dalam hubungan ini akan terjadi juga transfer personalia secara horizontal.

Oleh karena itu perlunya kajian yang mendalam mengenai transfer personalia tersebut yang tidak hanya berorientasi pada kepangkatan, jabatan struktural maupun fungsional, tetapi yang terpenting adalah adanya suatu manual prosedur yang memiliki sistem nilai obyektif yang dapat diterima secara terbuka oleh daerah setempat tanpa merasakan adanya unsur KKN.

Pemberian otonomi tentunya tidak hanya sebatas pemberian wewenang fungsional, tetapi juga wewenang fiskal yang dirasakan pada dasarnya memiliki keadilan serta fairness terhadap segala upaya kreatif inovatif yang dilakukan daerah otonomi tersebut dalam upaya meningkatkan revenue. Dalam konteks daerah Propinsi Sumatera Utara yang kehidupan ekonominya berbasiskan pada perkebunan, industri manufaktur serta perdagangan baik dari UU.No.25/1999 apalagi dengan masih berlakunya UU.No.18/1997 sangat dirasakan belum adanya suatu bentuk perimbangan fiskal yang berdasarkan prinsip equity dan equality yang menguntungkan daerah.

Penentuan perimbangan fiskal antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk desa merupakan kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Perimbangan fiskal ini seperti kondisi daerah Propinsi Sumatera Utara yang tidak seimbang kemampuan potensi daerahnya pada taraf masa sekarang antara satu daerah Kabupaten/Kota dengan yang lainnya, maka memerlukan suatu pemikiran tarif transfer fiskal tertentu agar kesiapan untuk berkembang paling tidak saling mendekati berdasarkan prinsip equity dan equality.

Dalam hubungan tersebut diperlukan good government yang mengikuti prinsip transparan, partisipasi dari masyarakat tidak hanya antar DPRD dengan ekskutif, akountabilitas, efisiensi dan HAM. Untuk ini diperlukan suatu jaringan sistem informasi dalam pengelolaannya

sehingga setiap pelaksanaan kegiatan upaya terciptanya sistem desentralistik atas prinsip keadilan dan fairness dapat dimonitor oleh setiap orang untuk diperbaiki. Disamping itu sebagai konsekuensi keinginan masyarakat untuk memberdayakan kepentingan mereka dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan otonomi daerah secara demokratis yang dapat mengontrol tingkah laku DPR/DPRD maupun Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka diperlukan sistem pemilihan anggota DPR maupun DPRD secara sistem distrik.

B. HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAERAH TINGKAT II

Dari hasil studi penilaian kemampuan Daerah Tingkat II yang dilakukan dengan mengamati keenaman variabel pokok, sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan
 - b. Nilai Absolut PAD
2. Kemampuan Aparatur, terdiri dari :
 - a. Ratio Jumlah Pegawai Terhadap Jumlah Penduduk
 - b. Masa Kerja Pegawai
 - c. Golongan Pegawai
 - d. Pendidikan Formal
 - e. Pendidikan Teknis Fungsional dan Perjenjangan
3. Kemampuan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Bidang Pembangunan Desa
 - b. Bidang Pendidikan
 - c. Bidang Kesehatan
 - d. Bidang Pelayanan Sosial
4. Kemampuan Ekonomi Daerah, terdiri dari :
 - a. Pendapatan per- kapita
 - b. Indeks Perkembangan Pendapatan per-kapita
 - c. Struktur PDRB

5. Kemampuan Demografi, terdiri dari :
 - a. Kepadatan Penduduk
 - b. Pertumbuhan Penduduk
 - c. Penduduk Buta Huruf
 - d. Ratio Ketergantungan
 - e. Pendidikan Penduduk Usia Sekolah
 - f. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan
 - g. Distribusi Lapangan Kerja
6. Kemampuan Administrasi dan Organisasi, terdiri dari :
 - a. Mengenai Administrasi dan Organisasi
 - b. Urusan Rumah Tangga Daerah

Maka diperoleh total score dan urutan setiap Dati II dapat dilihat pada tabel. 4.1. berikut :

1

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun luar negeri serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional, diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian hak Otonomi kepada Daerah oleh Pemerintah Pusat, selain dimaksud untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan rumah tangganya, juga dimaksudkan agar Daerah dapat menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Melihat keadaan dan kondisi perekonomian dan keuangan negara yang belum menggembirakan, kemungkinan besar akan mengakibatkan penurunan pemberian bantuan dari Pemerintahan Atasan dimasa mendatang. Untuk itu diperlukan suatu penelitian terhadap sumber pendapatan di daerah dengan melihat peluang dari pendapatan yang potensial untuk dikembangkan.

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan di Daerah yang didukung oleh UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan diwujudkannya penyelenggaraan otonomi daerah yang mempunyai kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan, maka setiap daerah berusaha untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan daerah terutama penerimaan dari pendapatan asli daerah. Kedudukan pendapatan asli daerah ini sangat strategis dan menjadi barometer dalam menganalisa kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan sehingga dapat mencerminkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada perkembangan daerah Kabupaten/Kota.

2

KEADAAN SOSIAL DAN EKONOMI DAERAH

A. Kekhususan Daerah

Daerah Propinsi Sumatera Utara terletak di antara $1^{\circ} - 4^{\circ}$ LU dan $98^{\circ} - 100^{\circ}$ BT yang juga merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan palung pasifik barat. Daerah ini berbatasan dengan Propinsi Istimewa Aceh di sebelah Utara, Selat Malaka di sebelah Timur, Propinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, serta di sebelah Selatan dengan Samudera Hindia.

Sumatera Utara dengan luas 71.680 km^2 secara geografis terbagi atas wilayah pantai timur, dataran tinggi, dan wilayah pantai barat. Daerah ini memiliki topografi, kontur dan iklim yang berbeda-beda.

Wilayah pantai timur merupakan dataran rendah seluas 26.360 km^2 atau 36,8 % dari luas Sumatera Utara merupakan daerah yang subur, berhawa panas, kelembaban tinggi dan bercurah hujan yang relatif tinggi. Wilayah lainnya, yaitu wilayah pegunungan serta wilayah pantai barat bagian terbesarnya merupakan pegunungan seluas 45.320 km^2 atau 63,2 % dari luas Sumatera Utara memiliki variasi dalam hal tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi, kontur serta tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik serta daerah yang struktur tanahnya relatif labil, sehingga sering mengalami bencana tanah longsor. Wilayah pantai barat mempunyai sejumlah danau, sungai dan air terjun serta beberapa gunung berapi.

Tata guna lahan di daerah Propinsi Sumatera Utara digolongan atas tata guna lahan menurut status penggunaan dan menurut klasifikasi penggunaan lahan. Untuk jelasnya, persentase sumber daya lahan menurut status penggunaan dan klasifikasi lahan di daerah Propinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2-1 dan 2-2 berikut ini :

Tabel 2-1. Persentase Luas Lahan Menurut Status Penggunaannya

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan (Ha)	Status Penggunaan Lahan (%)					
			Tanah Negara	Hak Pakai	HGU	HGB	Hak Pengelolaan	Tanah Milik
<u>Kabupaten</u>								
1. Nias		532.008	66,08	0,00	0,19	0,00	0,00	33,72
2. Tapanuli Selatan		1.878.962	43,11	0,00	0,13	0,03	0,13	56,59
3. Tapanuli Tengah		218.535	83,54	0,02	5,43	0,09	0,01	10,90
4. Tapanuli Utara		1.056.709	32,44	0,01	0,02	0,00	0,00	67,52
5. Labuhan Batu		921.367	40,52	0,01	0,09	0,00	0,00	59,38
6. Asahan		456.863	17,96	0,02	29,34	0,03	0,00	52,65
7. Simalungun		486.789	32,05	0,01	19,81	0,03	0,00	48,10
8. Dairi		314.610	55,74	0,01	0,18	0,00	0,00	44,07
9. Karo		215.380	71,32	0,01	0,00	0,01	0,00	28,65
10. Deli Serdang		440.794,27	23,13	0,03	0,25	33,40	0,00	43,19
11. Langkat		620.631	57,32	0,02	18,87	0,01	0,00	23,79
12. Mandailing Natal			-	-	-	-	-	-
13. Toba Samosir			-	-	-	-	-	-
<u>Daerah Kota</u>								
14. Sibolga		715	76,50	1,68	0,00	10,07	0,00	11,75
15. Tanjung Balai		6.052	57,25	1,52	8,79	0,96	0,36	31,12
16. Pematang Siantar		7.698	21,23	5,55	22,88	4,16	0,00	50,10
17. Tebing Tinggi		3.707	6,74	1,50	0,00	4,34	0,53	88,94
18. Medan		26.510	17,91	1,13	0,00	1,11	0,48	79,38
19. Binjai		9.015	8,61	4,15	15,22	2,76	0,00	69,46
Sumatera Utara		7.196.345,27	43,03	0,03	5,13	2,08	0,04	49,70

Sumber BPS-SU

Tabel 2-2. Persentase Luas Lahan Menurut Klasifikasi Penggunaan Lahan

Datu II (Kab / Kodya)	Luas Lahan (Ha)	KLASIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN (%)											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kabupaten													
Nias	532,008.00	1.12	4.12	4.68	7.27	12.51	0.00	0.41	0.01	51.81	12.90	0.41	4.77
Tapanuli Selatan	1,878,962.00	0.68	3.89	7.49	5.26	11.02	0.01	0.09	0.19	51.07	12.66	0.17	7.47
Tapanuli Tengah	218,535.00	1.42	5.74	1.45	3.95	30.57	0.04	0.01	0.03	49.38	7.01	0.39	0.00
Tapanuli Utara	1,056,709.00	2.95	6.66	7.84	3.93	6.67	0.00	0.00	0.00	45.87	14.55	10.67	0.85
Labuhan Batu	921,367.00	3.24	9.70	2.13	0.98	36.03	0.01	0.25	0.00	31.53	3.62	1.46	11.06
Asahan	456,863.00	4.60	16.59	1.16	1.37	58.35	0.05	0.06	0.03	9.82	0.00	0.05	7.93
Simalungun	486,789.00	2.65	17.10	10.22	8.86	38.25	0.00	0.04	0.00	15.70	7.10	0.07	0.00
Dairi	314,610.00	2.87	4.62	3.82	18.66	13.14	0.00	1.97	0.00	53.62	1.13	0.00	0.16
Karo	215,380.00	2.58	6.41	28.64	7.92	4.06	0.05	0.04	2.11	41.51	6.01	0.67	0.00
Deli Serdang	440,794.27	5.60	17.52	5.85	5.71	45.22	0.06	3.13	2.45	11.58	0.10	1.45	1.36
Langkat	620,631.00	1.45	8.16	4.39	1.41	29.02	0.00	0.01	0.01	50.56	3.20	0.90	0.90
Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daerah Kota													
Sibolga	715.00	29.51	0.00	0.98	0.00	20.98	0.00	7.27	1.26	0.00	30.07	3.50	6.43
Tanjung Balai	6,052.00	19.40	10.30	0.45	0.26	57.72	0.00	0.13	0.80	1.17	1.06	0.73	7.98
Pematang Siantar	7,698.00	28.72	30.09	6.50	10.42	23.12	0.00	0.79	0.09	0.00	0.00	0.00	0.27
Tebing Tinggi	3,707.00	51.56	39.61	0.24	0.65	0.00	0.00	0.67	0.53	0.00	0.00	0.00	6.74
Medan	26,510.00	48.03	0.00	22.69	7.54	0.00	0.00	3.50	0.66	4.60	0.00	0.03	12.95
Binjai	9,015.00	44.28	15.93	9.02	8.28	15.35	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
Sumatera Utara	7,196,345.27	2.60	8.18	6.40	4.99	22.68	0.01	0.39	0.27	39.80	8.07	2.03	4.58

Sumber : BPS-SU

Keterangan :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| A : Pemukiman | G : Industri dan Pariwisata |
| B : Sawah | H : Perhubungan |
| C : Pertanian Lahan Kering | I : Lahan Berhutan |
| D : Kebun | J : Padang |
| E : Perkebunan | K : Perairan Darat |
| F : Pertambangan Terbuka | L : Lain-lain |

B. Kondisi dan Potensi Daerah

Sejak akhir abad 19 di daerah Propinsi Sumatera Utara telah berkembang perkebunan-perkebunan besar seperti perkebunan karet, tembakau, kopi, teh dan kelapa sawit yang menempatkan daerah ini sebagai kawasan perkebunan terkemuka di Indonesia. Masyarakat Sumatera Utara relatif dinamis dan mobilitasnya tinggi, memiliki hubungan tradisional dengan masyarakat di daerah-daerah sekitarnya dan negara-negara tetangga.

Sejumlah perkebunan besar dan kecil telah berkembang di daerah ini. Sampai awal Pembangunan Jangka Panjang Kedua hasil perkebunan tersebut masih merupakan andalan utama komoditas ekspor Sumatera Utara. Sepanjang pantai timur terdapat laut yakni Selat Malaka yang merupakan wilayah penghasil ikan yang cukup besar. Perkebunan rakyat baik yang diusahakan secara mandiri maupun yang termasuk kategori pola perkebunan inti rakyat juga telah berkembang di daerah ini.

Perkebunan-perkebunan tersebut menghasilkan komoditas seperti minyak sawit, biji coklat kering, karet kopi, teh, buah-buahan dan berbagai jenis hasil hutan. Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dijumpai di seluruh Sumatera Utara terutama di wilayah pantai timur.

Jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 1998 adalah 11.754.100 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.910.949 jiwa (50,29 %) dan perempuan sebanyak 5.843.151 jiwa (47,71 %). Sedangkan kepadatan penduduknya adalah sebesar 200 jiwa per km². Penyebaran penduduk di Sumatera Utara tergolong tidak merata, dimana arus migrasi penduduk ke wilayah pantai timur telah mempertajam ketidak-seimbangan tersebut. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan sebagian diantaranya masih hidup dalam suasana agraris tradisional. Persentase jumlah penduduk Sumatera Utara menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2-3 :

Tabel 2-3. Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)	Persen. Jenis Kelamin terhadap Penduduk			
				Pria	(%)	Wanita	(%)
<u>Kabupaten</u>							
1.	Nias	5.318	688.400	344.900	50,10	343.500	49,90
2.	Tapanuli Selatan	12.763	753.300	461.245	61,23	292.055	38,77
3.	Tapanuli Tengah	2.188	256.600	127.300	49,61	129.300	50,39
4.	Tapanuli Utara	7.165	424.400	204.910	48,28	219.490	51,72
5.	Labuhan Batu	9.323	906.600	452.500	49,91	454.100	50,09
6.	Asahan	4.581	957.500	478.200	49,94	479.300	50,06
7.	Simalungun	4.369	869.000	432.000	49,71	437.000	50,29
8.	Dairi	3.146	302.000	148.400	49,14	153.600	50,86
9.	Karo	2.127	286.300	140.100	48,93	146.200	51,07
10.	Deli Serdang	4.339	1.920.000	967.200	50,38	952.800	49,63
11.	Langkat	6.262	889.500	445.300	50,06	444.200	49,94
12.	Mandailing Natal	6.134	372.400	151.604	40,71	220.796	59,29
13.	Toba Samosir	3.440	302.900	150.390	49,65	152.510	50,35
<u>Daerah Kota</u>							
14.	Sibolga	11	81.000	40.400	49,88	40.600	50,12
15.	Tanjung Balai	58	117.300	58.000	49,45	59.300	50,55
16.	Pematang Siantar	70	237.900	116.000	48,76	121.900	51,24
17.	Tebing Tinggi	31	138.400	68.200	49,28	70.200	50,72
18.	Medan	265	2.028.300	1.013.600	49,97	1.014.700	50,03
19.	Binjai	90	222.300	110.700	49,80	111.600	50,20
	Sumatera Utara	71.680	11.754.100	5.910.949	50,29	5.843.151	49,71

Sumber : BPS SU (Sumatera Utara Dalam Angka 1998)

Daerah Propinsi Sumatera Utara memiliki jaringan perhubungan yang relatif baik dengan daerah-daerah dan negara-negara disekitarnya. Dilain pihak hubungan dan kerjasama regional di berbagai bidang seperti kebudayaan, perdagangan, pariwisata dan sektor-sektor produksi barang masih perlu ditingkatkan. Prasarana dan sarana perhubungan, telepon dan telekomunikasi telah dimiliki oleh daerah ini, namun jangkauan jaringannya belum merata di seluruh pelosok daerah.

Bahan tambang yang beraneka ragam, pada umumnya tergolong bahan galian Golongan C yang memiliki deposit yang bervariasi jumlahnya merupakan potensi bagi pengembangan industri pertambangan berskala kecil sampai besar.

Potensi pertanian, pariwisata, pertambangan, kapasitas nyata yang sudah dicapai beberapa industri barang modal serta masyarakat yang dinamis dengan mobilitas tinggi merupakan faktor yang sangat mendukung bagi pengembangan sektor ke arah semua sub sektornya.

Sumatera Utara memiliki sumber-sumber energi alamiah berkapasitas besar berupa air terjun dengan total kapasitas sebesar 1.870 megawatt dan lokasi-lokasi geothermal dengan total kapasitas sekitar 1.500 megawatt. Pendayagunaan potensi ini akan sangat membantu pemenuhan energi di masa depan.

Daerah Propinsi Sumatera Utara memiliki berbagai fasilitas prasarana dan sarana yang relatif baik, seperti komunikasi, perbankan, konsultan, kesehatan dan jasa-jasa perdagangan lainnya sehingga berkemampuan mendorong pertumbuhan daerah-daerah di wilayah lingkungannya. Selain itu, wilayah Sumatera Utara memiliki pusat pendidikan dan penelitian seperti dijumpai di Perguruan Tinggi termasuk Politeknik, Balai Penelitian dan Balai Latihan Kerja. Pengolahan yang baik dari potensi ini akan dapat diciptakan tenaga pembangunan yang terdidik dan terampil serta hasil-hasil penelitian yang bermanfaat khususnya bagi pembangunan daerah.

Perkembangan jumlah perusahaan industri dan jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2-4 berikut ini :

Tabel 2-4. Perkembangan Jumlah Usaha Industri dan Tenaga Kerja di Sumatera Utara

No.	Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan			Jumlah Tenaga Kerja			Rasio Rata-rata
		1996	1997	1998	1996	1997	1998	
<u>Kabupaten</u>								
1.	Nias	6	5	5	130	112	245	1 : 30
2.	Tapanuli Selatan	13	17	18	1.607	2.073	2.214	1 : 123
3.	Tapanuli Tengah	16	13	13	2.475	2.231	2.200	1 : 164
4.	Tapanuli Utara	15	15	13	2.239	1.853	1.767	1 : 136
5.	Labuhan Batu	40	43	42	10.924	11.894	10.483	1 : 266
6.	Asahan	121	114	107	12.678	14.319	9.421	1 : 106
7.	Simalungun	58	57	51	17.300	15.556	17.263	1 : 302
8.	Dairi	-	-	-	-	-	-	-
9.	Karo	5	5	5	506	537	479	1 : 101
10.	Deli Serdang	350	322	306	56.350	52.039	54.323	1 : 166
11.	Langkat	44	42	40	12.754	11.435	11.990	1 : 287
12.	Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-	-
13.	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-
<u>Daerah Kota</u>								
14.	Sibolga	2	2	1	63	56	34	1 : 31
15.	Tanjung Balai	36	33	37	2.160	2.127	2.073	1 : 60
16.	Pematang Siantar	61	57	53	6.829	6.485	6.122	1 : 114
17.	Tebing Tinggi	32	30	25	2.266	2.342	2.278	1 : 79
18.	Medan	312	294	273	51.723	49.532	47.939	1 : 170
19.	Binjai	47	39	36	1.861	1.529	1.273	1 : 38
	Sumatera Utara	1.158	1.088	1.025	181.865	174.120	170.104	1 : 161

Sumber : BKPMD Sumatera Utara

C. Jumlah PMA dan PMDN di Daerah Propinsi Sumatera Utara

Jumlah PMA dan PMDN di daerah Propinsi Sumatera Utara masing-masing adalah sebanyak 117 buah PMA dan 258 buah PMDN. Untuk jelasnya, Penyebaran jumlah PMA dan PMDN di setiap daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2-5 berikut ini. Sedangkan perincian dari nama-nama perusahaan PMA dan PMDN setiap daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat dilihat pada Lampiran I.

Tabel 2-5. Penyebaran jumlah PMA dan PMDN di daerah Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	No.	Kabupaten/Kota	PMA	PMDN
1.	Medan	65	104	9.	Labuhan Batu	4	22
2.	Deli Serdang	28	68	10.	Simalungun	3	7
3.	Asahan	3	5	11.	Dairi	2	1
4.	Tapanuli Utara	5	11	12.	Sibolga	1	-
5.	Tapanuli Selatan	2	11	13.	Pematangsiantar	-	3
6.	Tapanuli Tengah	-	4	14.	Langkat	-	12
7.	Karo	2	7	15.	Tebing Tinggi	-	1
8.	Nias	2	2				
Jumlah PMA dan PMDN di daerah Sumatera Utara						117	258

Sumber : BKPMID Sumatera Utara

D. Keadaan Keuangan Daerah

PAD Sumatera Utara dalam tahun 1996/1997 s/d 1998/1999 menunjukan peningkatan sebesar 8,89 % dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 119.307.699.000,- sedangkan rata-rata APBD Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 1.006.558.829.000,- atau meningkat sebesar 34,85 %. Berdasarkan rata-rata PAD dan APBD Sumatera Utara terlihat bahwa konstribusi PAD terhadap APBD adalah sebesar 11,85 %.

Gambaran konstribusi rata-rata PAD terhadap APBD Sumatera Utara tahun 1996/1997 hingga 1998/1999 dapat dilihat pada Tabel 2-6 berikut ini :

Tabel 2-6. Kontribusi PAD terhadap APBD Sumatera Utara selama 3 tahun (1996/1997 s/d 1998/1999)

No	Daerah Kabupaten/Kota	PAD		Rata-rata PAD	Persen (%)	APBD		Rata-rata PAD	Persen (%)	(% PAD dpp APBD
		1996/1997	1997/1998			1996/1997	1997/1998			
Kabupaten										
1	Nias	1,276,080	1,398,724	1,558,077	1,410,960	10.50	23,746,162	37,488,758	45,088,999	37,322,590
2	Tapanuli Selatan	3,255,727	3,882,127	2,276,940	3,138,265	-11.05	46,573,345	64,515,986	118,872,874	80,838,418
3	Tapanuli Tengah	1,346,696	1,501,200	1,632,741	1,493,546	10.12	21,080,615	24,343,785	40,356,300	30,584,964
4	Tapanuli Utara	4,311,200	4,843,836	5,693,520	4,949,519	14.95	35,674,456	49,645,881	100,216,357	68,444,928
5	Labuhan Batu	4,488,535	5,037,557	3,125,541	4,217,211	-12.86	36,213,192	48,874,917	80,007,851	60,654,930
6	Asahan	3,167,167	3,522,629	4,326,412	3,672,069	17.02	39,446,389	46,259,048	88,450,488	62,948,073
7	Simalungun	4,297,931	5,100,717	5,645,775	5,014,674	14.68	82,747,898	99,363,262	103,907,491	102,025,788
8	Dairi	1,137,326	1,293,495	1,534,888	1,321,903	16.20	17,515,187	19,671,594	36,522,881	26,312,430
9	Karo	3,577,101	4,273,126	4,499,233	4,116,487	12.37	21,612,000	27,516,641	25,885,000	30,493,200
10	Deli Serdang	8,311,503	11,974,293	14,822,509	11,722,768	33.93	53,711,134	65,172,955	123,829,839	96,508,345
11	Langkat	3,476,969	6,564,080	6,639,178	5,560,076	44.97	35,236,452	51,266,140	82,082,643	63,608,528
12	Mandailing Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daerah Kota										
14	Sibolga	1,363,554	1,467,646	1,503,235	1,444,812	5.03	12,050,730	14,674,867	16,459,068	16,320,306
15	Tanjung Balai	2,055,456	2,445,219	2,636,725	2,379,133	13.40	12,180,042	14,427,086	20,918,803	19,014,159
16	Pematang Siantar	4,537,221	4,928,119	5,906,554	5,123,965	14.23	17,242,071	20,312,595	37,826,627	31,959,055
17	Tebing Tinggi	1,690,012	1,824,843	2,256,189	1,923,681	15.81	13,629,035	13,784,355	22,285,594	19,131,242
18	Medan	54,422,739	67,493,614	55,365,895	59,094,083	3.02	144,839,738	163,648,239	162,090,432	235,651,581
19	Binjai	2,496,003	2,779,974	2,957,665	2,744,547	8.88	15,328,130	17,019,895	30,834,857	24,720,360
	Sumatera Utara	105,211,220	130,331,199	122,380,677	119,307,699	8.89	628,826,576	777,983,004	1,135,636,104	1,006,558,829
										34.85
										11.85

Sumber : BPS-SU

Tingkat pertumbuhan belanja rutin dan pembangunan TA. 1994/1995 s/d 1998/1999 menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 48,73 % dan 19,20 %. Bila dilihat dari konstribusi PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan, terlihat bahwa besarnya konstribusi PAD terhadap kedua belanja tersebut masing-masing sebesar 18,06 % dan 23,63 %.

Konstribusi PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan di Sumatera Utara, dapat dilihat pada Tabel 2-7 dan 2-8 berikut ini :

